

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM KABUPATEN, DAN PENGANGGURAN, TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN MADIUN

Deby Oktaviana, Wiwin Priana Primandhana dan Mohammad Wahed

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Indonesia

Email: deby.oktaviana10@gmail.com, wiwinpriana10@gmail.com, dan
muhammadwahed124@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find out about the effects of economic growth, district minimum wages, and unemployment on poverty in Madiun Regency in 2002-2019. This research utilizes secondary data sources which are data collected by researchers through the statistical center of East Java and Madiun. By adopting a quantitative approach method through multiple linear regression analysis with the Ordinary Least Square (OLS) model. This study is able to show an increase in the economy along with the district minimum wage, so that the influence variable of economic growth and district minimum wages on poverty in Madiun Regency is considered to have a significant effect and negative. However, unemployment variable on poverty in Madiun doesn't have a significant effect.

Keyword: *poverty; economic growth; minimum wages; unemployment*

Abstrak

Pelaksanaan penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari tahu tentang pengaruh yang dapat ditimbulkan dari pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten, beserta pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2002-2019. Penelitian ini memanfaatkan sumber data sekunder yang merupakan data yang berhasil dihimpun oleh peneliti melalui badan pusat statistik Jawa Timur dan Madiun. Dengan mengadopsi metode pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi linier berganda dengan model *Ordinary Least Square (OLS)*, penelitian ini mampu memperlihatkan adanya peningkatan ekonomi beserta upah minimum kabupaten, sehingga variabel pengaruh dari pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun dinilai memiliki pengaruh yang bernilai negatif dan signifikan. Akan tetapi variabel pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun tidaklah berpengaruh secara signifikan.

Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten pengangguran; kemiskinan

Pendahuluan

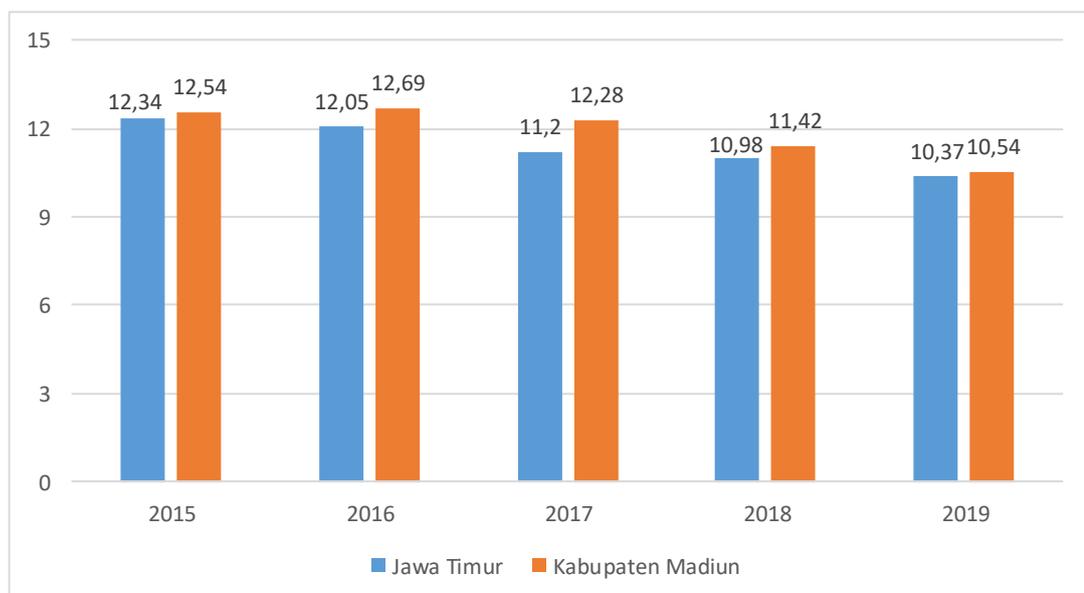
Menurut (Marini, 2016) mendefinisikan bahwa pembangunan ialah upaya dalam mensejahterakan masyarakat yaitu dengan mengembangkan perekonomian. Upaya dalam membangun perekonomian berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh

(Wijayanti & Wahono, 2005) ialah meningkatkan pertumbuhan beserta menekan angka kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi di masyarakat beserta dengan tingkat pengangguran yang melanda masyarakat.

Di negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang, kemiskinan merupakan permasalahan yang umum terjadi. Banyak sekali negara dalam kategori ini memiliki tugas untuk menumpas kemiskinan dan memakmurkan masyarakatnya (Pratama, 2014) Sebuah masyarakat yang dikategorikan miskin apabila jumlah anak yang menderita gizi buruk masih banyak jumlahnya, tingginya angka buta huruf yang dialami masyarakat, minimnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, serta kebutuhan infrastuktur publik yang tidak memadai beserta dengan buruknya tingkat pelayanan publik (Tisniwati, 2012). Indonesia mengalami permasalahan kemiskinan ini disebabkan masih rendahnya pendapatan masyarakat, tingginya angka pengangguran, beserta pertumbuhan ekonomi yang tidak pesat (Pateda et al., 2017).

Permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan serius, hal ini disebabkan jumlahnya akan cenderung meningkat serta dapat mempengaruhi berbagai aspek (Pratama, 2014). Beranjak dari hal ini, penanganan akan kemiskinan lebih diutamakan dalam pembangunan ekonomi.

Saat ini telah terlihat bahwa angka kemiskinan di Indonesia tiap tahun terus menurun. Penurunan ini dikarenakan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dengan menyusun strategi jitu yaitu dengan memberikan perlindungan sosial yang komperhensif, menyediakan beserta meningkatkan akses dalam memperoleh pelayanan publik, serta mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat terus menghidupi (BPS Jawa Timur, 2020a) Untuk melihat perkembangan kemiskinan Jawa Timur dan Kabupaten Madiun dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1 Kemiskinan di Jawa Timur dan Kabupaten Madiun Tahun 2015-2019

Sumber : (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2020)

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Madiun

Berdasarkan gambar tabel diatas angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur terus mengalami penurunan selama tahun 2015-2019, sedangkan pada Kabupaten Madiun meskipun pada periode tahun 2015 hingga 2017 justru mengalami fluktuasi dan pada tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan upaya pemerintah daerah sebagai pemimpin berbanding lurus dengan target pembangunan yang telah terencana.

Kemiskinan pada Provinsi Jawa Timur terus mengalami penurunan disebabkan oleh karakteristik pendidikan di Jawa Timur semakin membaik setiap tahun seiring dengan gencarnya berbagai program pendidikan yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat khususnya penduduk miskin (BPS Jawa Timur, 2020a). Dalam hal ini yang termasuk dalam karakteristik pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan yang ditamatkan (BPS Jawa Timur, 2020a).

Namun dengan terus menurunnya tingkat kemiskinan, Provinsi Jawa Timur masih menempati peringkat ke-3 dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa lainnya seperti Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DIY. Kondisi ini dikarenakan tiap tahun terus terjadi peningkatan angka kemiskinan dikarenakan urbanisasi yang terus menerus terjadi tiap tahunnya dengan tidak disertai dengan pemerataan persebaran penduduk (BPS Jawa Timur, 2020a). Data berdasarkan hasil sensus yang dilakukan BPS pada 2010 menyatakan bahwa 57,48% orang dari total jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa, hal ini membuktikan bahwa Pulau Jawa telah dinilai padat penduduk dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia. Data ini juga turut dilengkapi dengan fakta bahwa 27,43% dari jumlah tersebut merupakan penduduk yang bermukim di Provinsi Jawa Timur (Zamhari et al., 2015). Hal ini mengakibatkan kesenjangan pembangunan dan tingkat pendapatan per daerah menjadi tidaklah merata yang berakibat pada ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi (Prawidya, 2016).

Misalnya pada daerah Surabaya memiliki jumlah penduduk terbanyak di Jawa Timur sehingga pembangunan banyak dipusatkan pada daerah tersebut dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit. Terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah ini selanjutnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat pada daerah yang bersangkutan (Prawidya, 2016)

Pada tahun 2019, Madiun telah mencatat bahwa terjadi penurunan tingkat kemiskinan hingga 0,88% apabila dibandingkan dengan tahun 2018, tingkat kemiskinan Kabupaten Madiun ini menempati posisi ke- 16 dari jumlah total 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur (BPS Kabupaten Madiun, 2021) Menurunnya kemiskinan d Kabupaten Madiun dipengaruhi oleh meningkatnya kesejahteraan masyarakat yaitu dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita dan konsumsi masyarakat (BPS Kabupaten Madiun, 2021)

Tabel 1
Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, Pengangguran tahun 2015-2019

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Upah Minimum Kabupaten (Rp)	Pengangguran (%)
2015	5,26	1.201.750	6,99
2016	5,27	1.340.000	6,69
2017	5,42	1.450.550	3,19
2018	5,10	1.576.893	3,81
2019	5,42	1.763.268	3,62

Sumber : (BPS Jawa Timur, 2020b)&(Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2020) data diolah

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Madiun tahun 2019 sebesar 5,42%. Pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Madiun mengalami peningkatan pada tahun 2019, hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi tanaman pangan terutama tanaman padi sejumlah 58,92% dari total jumlah produksi (BPS Kabupaten Madiun, 2021). Kondisi tersebut disebabkan karena sektor yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Madiun merupakan sektor pertanian (BPS Kabupaten Madiun, 2021).

Upah minimum kabupaten di Kabupaten Madiun setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur No : 188/666/KPTS/013/2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2019 bahwa UMK Kabupaten Madiun Tahun 2019 ditetapkan sejumlah Rp. 1.763.268 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 dengan jumlah Rp. 1.576.893. Meningkatnya UMK tidak serta merta dapat menurunkan angka kemiskinan, hal ini disebabkan adanya peningkatan dalam nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sehingga pemerintah merasa perlu adanya peningkatan untuk menjamin kesejahteraan para pekerja di daerahnya (Merdekawaty et al., 2016)

Dilihat melalui perbandingannya, tingkat pengangguran di Kabupaten Madiun dengan kabupaten/kota lain wilayah di Provinsi Jawa Timur berada di urutan ke 17 yang berarti naik empat peringkat dibanding pada tahun 2018 yang berada di urutan ke-21 (BPS Jawa Timur, 2020a). Pengangguran di Kabupaten Madiun pada tahun 2019 trennya menurun sebesar 0,18%. Penurunan pengangguran di Kabupaten Madiun tersebut disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat perihal pentingnya mengenyam dunia pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan memilih untuk menunda kerja untuk menggapai pendidikan yang jauh lebih layak lagi. Sedangkan angka pengangguran di Kabupaten Madiun di dominasi oleh masyarakat lulusan SMA (BPS Kabupaten Madiun, 2021).

Dalam menentukan keberhasilan dalam pembangunan yang terjadi di suatu negara, dibutuhkannya penilaian atas pertumbuhan ekonomi beserta angka kemiskinan yang berada di negara tersebut. Apabila suatu negara berhasil mengatasi permasalahan tersebut dengan menunjukkan bahwa angka kemiskinan menurun, maka negara tersebut dinyatakan telah berhasil membangun negaranya dengan maksimal (Jonaidi, 2012).

Masyarakat miskin diakibatkan oleh kekurangan dana atau tidak memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Harlik et al., 2013). Dengan penerapan upah minimum maka pendapatan masyarakat akan meningkat maka ke depannya diharapkan mampu lebih mensejahterakan masyarakatnya serta menekan angka kemiskinan yang melanda. Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan banyaknya pengangguran, menurut Yacoub (2012) secara teori apabila seorang individu atau masyarakat memiliki pekerjaan maka akan dapat memenuhi kebutuhannya menggunakan upah kerja yang dimiliki sehingga kebutuhan hidup akan terpenuhi.

Berbagai penelitian yang bertopik pada kemiskinan telah sering kali dilaksanakan, salah satunya dilaksanakan oleh (Purnama, 2017), (Hambarsari & Inggit, 2016), (Windra et al., 2016) yaitu membuktikan bahwa secara signifikan dan negatif, pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan. Akan tetapi pernyataan yang berbeda dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyoningrum, 2018), (Romi & Umiyati, 2018) yaitu menyatakan bahwa dari pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan antara kedua faktor tersebut.

Penelitian tentang pengaruh UMK terhadap kemiskinan yang dilakukan oleh (Safitri et al., 2020), (Yusnedi et al., 2019) menyatakan bahwa secara negatif dan signifikan UMK dapat mempengaruhi kemiskinan. Akan tetapi (Kurniawati et al., 2017), (Suyono, 2018) menyatakan bahwa UMK tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kemiskinan.

Penelitian tentang pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan dilakukan oleh (Bintang & Woyanti, 2018), (Prasetyoningrum, 2018), (Kurniawan, 2018) membuktikan adanya pengaruh yang positif serta signifikan antara pengangguran terhadap kemiskinan. Akan tetapi (Zuhdiyati & Kaluge, 2017), (Diramita & Usman, 2018) memberikan pernyataan yang berbeda bahwa antara pengangguran terhadap kemiskinan tidak ditemukan pengaruh yang signifikan.

Dilandaskan pada pemaparan akan hasil penelitian terdahulu tersebut, ditemukan bahwa adanya keragaman dalam faktor determinan atas topik perihal kemiskinan. Hasil yang diutarakan sejumlah pihak yang telah menjalankan penelitian mengenai topik ini tidaklah seragam dan konsisten. Beranjak dari hal ini, peneliti merasa masih dibutuhkannya penelitian dengan mengangkat topik ini yaitu dengan melakukan serangkaian pengujian terhadap determinan dari kemiskinan terbaru. Pada penelitian ini, tingginya tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Madiun menjadi persoalan yang akan diteliti dimana kemiskinan di Kabupaten Madiun masih tergolong cukup tinggi yang menggambarkan upaya pemerintah daerah sebagai pemimpin belum mampu mengatasi masalah kemiskinan dimana hal tersebut dapat menghambat target pembangunan yang telah terencana. Hal tersebut menunjukkan diperlukan adanya analisis berbagai faktor yang mempengaruhinya, meliputi pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten, dan pengangguraan. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengambil judul penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Madiun”.

Metode Penelitian

Dengan menerapkan metode kuantitatif dalam melangsungkan penelitian ini peneliti akan berpegang teguh pada filsafat positivisme untuk melangsungkan penelitian terhadap populasi atau sampel tertentu, dalam menghimpun data, menganalisis data secara kuantitatif, sehingga peneliti mampu memberikan jawaban atas hipotesis yang telah ditetapkan. Tujuan dari diadakannya penelitian ini ialah menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten, dan pengangguran, terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2002-2019.

Dalam menghimpun data, peneliti memanfaatkan sejumlah sumber data sekunder yaitu dengan mengadakan studi keperpustakaan sehingga peneliti mendapatkan sejumlah informasi berdasarkan berbagai literatur yang tersedia. Peneliti juga memanfaatkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur dan Madiun selama periode tahun 2002-2019 serta Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

Data yang berhasil peneliti himpun kemudian peneliti analisis dengan menerapkan analisis regresi linier berganda dengan model Ordinary Least Square (OLS). Analisis regresi linier berganda ialah metode yang diterapkan guna melihat adanya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel independen (X_1, X_2, X_3, \dots, k) terhadap variabel dependen (Y). Persamaan Model Regresi Linier Berganda :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Kemiskinan
- X_1 = Pertumbuhan Ekonomi
- X_2 = Upah Minimum Kabupaten
- X_3 = Pengangguran
- β_0 = Konstanta (nilai Y apabila $X_1, X_2, X_3 = 0$)
- β = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)
- e = sisa (error)

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

Melalui pengolahan data yang memanfaatkan bantuan perangkat keras komputer dengan program IBM SPSS versi 25, peneliti mendapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 32,257 - 2,390X_1 - 6,381E-6X_2 + 0,245X_3$$

Berdasarkan atas persamaan seperti yang dituliskan sebelumnya dapat diuraikan, Nilai konstanta sejumlah 32,257 Menunjukkan apabila Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Upah Minimum Kabupaten (X_2) dan Pengangguran (X_3) dianggap

konstan maka Kemiskinan (Y) akan naik sebesar 32,257 persen. Koefisien regresi X1 (β_1) : $Y = - 2,390$ Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara negatif dalam Pertumbuhan Ekonomi (X1). Hal ini dapat diidentifikasi bahwa apabila angka pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka angka kemiskinan (Y) akan menurun sejauh 2,390 persen. Dengan mengasumsikan X2 dan X3 Konstan. Koefisien regresi X2 (β_2) : $Y = - 6,381E-6$ Menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten (X2) berpengaruh negatif, dapat diartikan apabila upah minimum kabupaten mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka angka kemiskinan (Y) mengalami penurunan sebesar 6,381E-6 persen. Dengan asumsi X1 dan X3 Konstan. Koefisien regresi X3 (β_3) : $Y = 0,245$ Menunjukkan bahwa pengangguran (X3) berpengaruh positif, dapat diartikan apabila angka pengangguran mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka kemiskinan (Y) mengalami kenaikan sejumlah 0,245 persen. Dengan asumsi X1 dan X2 Konstan.

1. Hasil Uji Asumsi Klasik (BLUE / Best Linier Unbiased Estimator)

a. Uji Normalitas

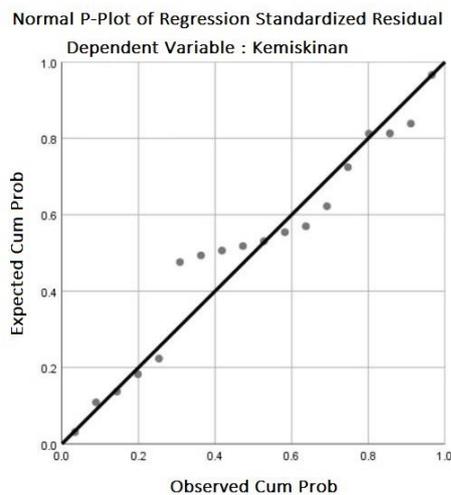
One Sample Solgomorov Sminov Test yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk melangsungkan pengujian atas normalitas dengan memanfaatkan P-P Plot. Hasil yang didapatkan melalui uji ini terlampir pada tabel di bawah :

Tabel 2
Uji Normalitas (*One Sample Solgomorov Sminov Test*)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstand ardized Residual
N		18
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000000
	Std. Deviation	.169359
		.39
Most Extreme Differences	Absolut e	.196
	Positive	.090
	Negativ e	-.196
Test Statistic		.196
Asymp. Sig. (2-tailed)		.066 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Output SPSS

Setelah menjalan pengujian ini, dapat dilihat bahwa data yang ada pada penelitian ini telah terdistribusi secara normal, dilihat berdasarkan nilai signifikan residual yang melebihi 0,05. Dapat dilihat bahwa nilai kolmogrov smirnov yang diperoleh berdasarkan penelitian ini, senilai 0,196 dan nilai Asymp Sig. (2-tailed) 0,066. Sehingga terlihat bahwa nilai signifikan residual yaitu $0,066 > 0,05$, yang kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa data tersebut secara normal terdistribusi. Untuk grafik uji P-P Plot terlampir berikut :



Gambar 2. Uji Normalitas (P-P Plot)

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan pada pengujian P-P Plot, terlihat bahwa data atau titik tersebar pada pada sumbu diagonal grafik yaitu pada sekitar areal sumbu diagonal dan mengarah pada sumbu diagonal atau grafik histogramnya. Hal ini memperlihatkan bahwa pola terdistribusi secara normal sehingga model regresi sesuai dengan asumsi normalitas.

b. Uji Linearitas

Uji linearitas dapat dilakukan melalui test of linearity. Kriteria yang berlaku adalah jika nilai signifikansi pada linearity $\leq 0,05$

Tabel 3
Uji Linearitas

Variabel	Sig	Ketentuan
Pertumbuhan ekonomi	0,031	$\leq 0,05$
Upah minimum kabupaten	0,000	$\leq 0,05$
Pengangguran	0,010	$\leq 0,05$

Sumber : Output SPSS

Tabel 3 telah memaparkan adanya signifikansi dalam nilai yang dapat mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten, dan pengangguran. Hal ini didapatkan dengan mengamati kolom Linearity pada tabel anova yang menunjukkan $\leq 0,05$, sehingga ditarik kesimpulan bahwa semua variabel x berpola linier terhadap variabel y.

c. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi memperoleh bahwa nilai yang diperoleh pada DW test senilai 1,013. Pada persamaan kali ini, total variabel bebas (k) ialah 3 beserta jumlah data (n) ialah 18, hal ini menunjukkan bahwa nilai DW tabel adalah sebesar $dL = 0,9331$ dan $dU = 1,6961$. Beranjak dari hal tersebut, nilai DW test terletak di antara nilai dL hingga dua, oleh karena itu, data yang diuji dalam penelitian ini terletak pada daerah keragu-raguan atau tidak terdampak gejala autokorelasi, sehingga dapat diterapkan pada penelitian berikutnya.

d. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan setelah memperoleh hasil dari pengujian atas analisis regresi linier berganda yang menunjukkan nilai VIF pertumbuhan ekonomi (1,509), upah minimum kabupaten (1,844), dan pengangguran (1,421). Dari hasil pengujian tersebut, terlihat semua variabel bernilai di bawah 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya multikolinieritas dalam model regresi ini.

e. Uji Heterokedastisitas

Terdapat pengecualian di dalam regresi linier pada nilai residual, yaitu tidak diperkenalkannya hubungan terhadap variabel bebas (X). Pengujian ini memperlihatkan bahwa tingkat signifikansi koefisien korelasi Rank Spearman untuk variabel terikat Kemiskinan, keseluruhan residualnya lebih besar dari 0,05 (tidak signifikan). Beranjak dari perolehan tersebut, maka nilai residual terhadap variabel yang memaparkan bahwa tidak adanya korelasi yang bernilai, sehingga dapat ditarik sebuah simpulan bahwa persamaan yang telah dilangsungkan tersebut tidak terlihat adanya heterokedastisitas.

2. Pengujian Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4
Uji Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error Of The Estimate</i>
1	0,956 ^a	0,913	0,895	1,67673

Sumber: Output SPSS

Didasarkan pada output penelitian, diperoleh bahwa koefisien determinasi senilai 0,913 artinya 91,3 % berdasarkan semua penguian yang telah dilangsungkan maka variabel bebas Pertumbuhan Ekonomi (X1),

Upah Minium Kabupaten (X2) dan Pengangguran (X3) dinilai dapat memaparkan variasi variabel terikatnya yaitu Kemiskinan (Y), sisanya 8,7 % memperoleh pengaruh dari variabel di luar penelitian.

b. Uji F

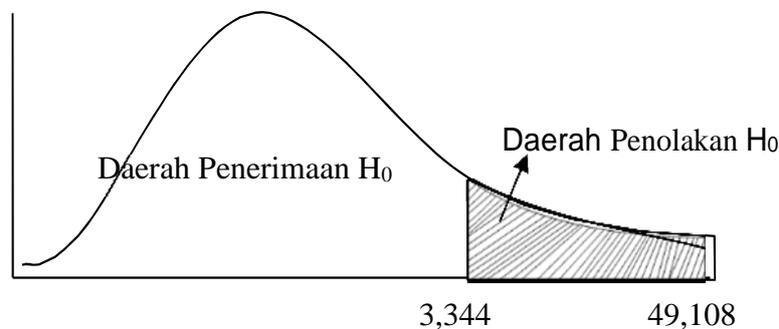
Tabel 5
Uji F Simultan (ANOVA)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	414.192	3	138.064	49.108	.000 ^b
	Residual	39.360	14	2.811		
	Total	453.552	17			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Output SPSS

Pengujian F ditujukan guna menelusuri pengaruh ataupun keterkaitan secara simultan (serempak). Berdasarkan pengujian ini, didapatkan bahwa nilai F hitung senilai 49,108 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000b dengan taraf signifikansi 5 persen atau ($\alpha = 0,05$) sehingga nilai sig $0,000 < 0,005$. Sedangkan nilai F tabel dengan degree of freedom (df1) adalah 3 (jumlah variabel bebas/k) dan df2 14 ($n-k-1$) diperoleh nilai F tabel sebesar 3,344. Berdasarkan pengujian tersebut, didapatkan bahwa nilai F hitung $49,108 \geq F$ tabel 3,344 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat ditarik simpulan bahwa secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, dan Pengangguran berimbas positif terhadap Kemiskinan di Kabupaten Madiun yang kemudian ditunjukkan melalui kurva uji F berikut.



Gambar 3
Kurva Distribusi Uji F

c. Uji T

Tabel 6
Uji T Parsial

Variabel	T Hitung	T Tabel	Sig.
Pertumbuhan Ekonomi (X_1)	-4,278	2,145	0,001
Upah Minimum Kabupaten (X_2)	-5,557	2,145	0,000
Pengangguran (X_3)	1,074	2,145	0,301

Sumber: Output SPSS

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Dari perhitungan secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar $-4,278$ sedangkan nilai sig ($\alpha/2= 0,025$) dengan *degree of freedom* (df) 14 ($n-k-1$) diperoleh nilai t tabel sebesar 2,145. Dari hasil tersebut diketahui bahwa nilai t hitung $-4,278 \geq t$ tabel 2,145 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Maka Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan kepada Kemiskinan di Kabupaten Madiun.

2. Variabel Upah Minimum Kabupaten

Dari perhitungan secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar $-5,557$ sedangkan nilai sig ($\alpha/2= 0,025$) dengan *degree of freedom* (df) 14 ($n-k-1$) diperoleh nilai t tabel sebesar 2,145. Dari hasil tersebut diketahui bahwa nilai t hitung $-5,557 \geq t$ tabel 2,145 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka Upah Minimum Kabupaten berpengaruh negatif dan signifikan kepada Kemiskinan di Kabupaten Madiun.

3. Variabel Pengangguran

Dari perhitungan secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 1,074 sedangkan nilai sig ($\alpha/2= 0,025$) dengan *degree of freedom* (df) 14 ($n-k-1$) diperoleh nilai t tabel sebesar 2,145. Dari hasil tersebut diketahui bahwa nilai t hitung $1,074 \leq t$ tabel 2,145 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, dengan nilai signifikansi $0,301 > 0,05$. Maka Pengangguran tidak berpengaruh signifikan kepada Kemiskinan di Kabupaten Madiun.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2002-2019. Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Purnama, 2017), (Hambar Sari & Inggit, 2016), (Windra et al., 2016) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun berpengaruh

terhadap kemiskinan, hal ini tersebut dipengaruhi oleh sektor pertanian terutama tanaman pangan. Kabupaten Madiun yang menjadi salah satu tulang punggung sektor pertanian tanaman pangan di Jawa Timur dengan produksi padi menempati peringkat ke-7 tertinggi se-Jawa Timur pada tahun 2020 yang memiliki produksi sebesar 453,54 ribu ton GKG (Gabah Kering Giling) (BPS Kabupaten Madiun, 2021a). Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun mampu melihat peluang dalam pengelolaan pertanian sebagai sarana guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan program peningkatan pengelolaan pra dan pasca panen di Kabupaten Madiun dan menerapkan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan guna melindungi lahan-lahan pertanian di Kabupaten Madiun (Madiunkab.go.id, 2021). Lebih lanjut menurut Kuznet dalam Tambunan (2001) pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan yang kuat terhadap kemiskinan, terdapat suatu korelasi menemukan bahwa adanya hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan yaitu apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan

2. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kemiskinan

Upah minimum kabupaten secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2002-2019. Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Safitri et al., 2020) dan (Yusnedi et al., 2019) yang menjelaskan bahwa upah minimum kabupaten berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Upah minimum di Kabupaten Madiun dipengaruhi oleh nilai kebutuhan hidup layak (KHL). Nilai kebutuhan layak ini didapatkan dari hasil survey yang dilakukan oleh tim survey Dewan Pengupahan Provinsi/Kota dimana survey tersebut dilakukan di pasar-pasar tradisional dengan responden penjual barang-barang kebutuhan sehari-hari (Mahila, 2014). Selain itu pengaruh negatif dan signifikan upah minimum terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun senada dengan tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga terbebas dari kemiskinan. Menurut (Khabhibi, 2010) Semakin tingginya upah minimum maka akan semakin tinggi pula pendapatan masyarakat sehingga berpengaruh pada kesejahteraan yang meningkat dan pada akhirnya terbebas dari kemiskinan.

3. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Pengangguran secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2002-2019. Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Zuhdiyaty & Kaluge, 2017) dan (Diramita & Usman, 2018) yang menjelaskan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal tersebut berbeda dengan teori dan hipotesa yang dikeluarkan oleh (Sukirno, 2004) yang mengatakan bahwa pengangguran memberikan dampak yang buruk yaitu dapat mengurangi

pendapatan masyarakat hingga dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan yang sebelumnya telah dicapai oleh seseorang menurun, jika tingkat kesejahteraan semakin menurun yang disebabkan oleh menganggur maka dapat menjebak dalam kemiskinan. Banyaknya pengangguran di Kabupaten Madiun disebabkan oleh masih banyaknya kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja yang ada dengan lowongan pekerjaan yang tersedia (*BPS Kabupaten Madiun, 2021a*). Selain itu, menurut uji yang telah dilakukan menyatakan kemiskinan di Kabupaten Madiun tidak dipengaruhi oleh tingkat pengangguran, karena tingkat pengangguran bukan satu-satu faktor yang menyebabkan kondisi kemiskinan, dimana pengangguran di Kabupaten Madiun adalah penduduk dengan kondisi yang baru saja telah menyelesaikan pendidikan yang sedang berada pada waktu pencarian kerja dengan kesesuaian pada keahlian yang telah dimiliki dan juga pada tingkat penghasilan yang sesuai dengan keinginan. Selain itu, tingkat pendapatan keluarga yang cukup tinggi dengan hal tersebut dapat memberikan biaya hidup dari anggota keluarga yang merupakan pengangguran. Pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan (*Todaro, 2003*). Secara teori apabila masyarakat mendapatkan pendapatan maka secara umum masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Apabila tingkat pengangguran (terbuka dan terselubung) tinggi maka kemiskinan akan marak ditemukan (*Todaro, 2000*).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa secara negatif dan signifikan mampu mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2002-2019. Hal tersebut dipengaruhi oleh sektor pertanian terutama tanaman pangan. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Madiun menjadi pusat pertanian yaitu dengan memproduksi bahan pangan untuk wilayah Jawa Timur. Hal ini dibuktikan bahwa Kabupaten Madiun mampu menduduki posisi ke-7 sebagai kabupaten yang paling banyak memproduksi padi di Jawa Timur pada 2020. Upah minimum kabupaten secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2002-2019. Upah minimum di Kabupaten Madiun dipengaruhi oleh nilai kebutuhan hidup layak (KHL) yang didapatkan melalui survey pasar oleh tim survey Dewan Pengupahan Provinsi/Kota. Pengangguran secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2002-2019. Pertumbuhan Ekonomi secara parsial Banyaknya pengangguran di Kabupaten Madiun disebabkan oleh masih banyaknya kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja yang ada dengan lowongan pekerjaan yang tersedia, banyaknya penduduk dengan kondisi yang baru saja telah menyelesaikan pendidikan yang sedang berada pada waktu pencarian kerja, tingkat pendapatan keluarga yang tinggi.

BIBLIOGRAFI

- Badan Pusat Statistik Jawa Timur.* (2020).
- Bintang, A. B. M., & Woyanti, N. (2018). Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (2011-2015). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(1), 20–28. [Google Scholar](#)
- BPS Jawa Timur. (2020a). BPS Jawa Timur. <https://jatim.bps.go.id/>.
- BPS Jawa Timur.* (2020b). <https://www.bps.go.id/>
- BPS Kabupaten Madiun.* (2021a). <https://jatim.bps.go.id/>
- BPS Kabupaten Madiun.* (2021b). <https://madiunkab.bps.go.id/>.
- Diramita, & Usman, U. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 01, 46–52. [Google Scholar](#)
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.* (2020).
- Hambarsari, D. P., & Inggit, K. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2004-2014. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 257–282. [Google Scholar](#)
- Harlik, Amir, A., & Hardiani. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi. *Persepektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 109–120. [Google Scholar](#)
- Jonaidi, A. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Kajian Ekonomi*, 1(April), 140–164.
- Khabhibi, A. (2010). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*. Surakarta:Universitas Sebelas Maret. [Google Scholar](#)
- Kurniawan, R. A. (2018). Pengaruh Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di kota Surabaya. *Jupe*, 6(2009), 103–109. [Google Scholar](#)
- Kurniawati, A., Gunawan, B. T., & Ratna Indrasari, D. P. (2017). Dampak Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2006-2014. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen*, 17(2), 233. [Google Scholar](#)
- Madiunkab.go.id.* (2021). *Kabupaten Madiun*.
- Mahila, S. (2014). Kebutuhan Hidup Layak dan Pengaruhnya terhadap Penetapan Upah Minimum Provinsi Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 14(2), 43–46 dan 161–169. [Google Scholar](#)

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Madiun

- Marini, T. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di kabupaten berau. *INOVASI*, 12(1), 108–137. [Google Scholar](#)
- Merdekawaty, R., Ispriyanti, D., & Sugito. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model Spatial Autoregressive (Sar). *Gaussian*, 5(3), 525–534. [Google Scholar](#)
- Pateda, Y., Masinambouw, V. A. J., & Rotinsulu, T. O. (2017). Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Gorontalo. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 1–17. [Google Scholar](#)
- Prasetyoningrum, A. K. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217. [Google Scholar](#)
- Pratama, Y. C. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(2). [Google Scholar](#)
- Prawidya. (2016). Analisis Ketimpangan Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kriminalitas di Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomikawan*, 16(1), 77358. [Google Scholar](#)
- Purnama, N. E. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomikawan*, 9(1), 76–99. [Google Scholar](#)
- Romi, S., & Umiyati, E. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 1–7. [Google Scholar](#)
- Safitri, R., Baihaqi, J., & Supriyadi, S. (2020). Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Pembangunan Manusia Berbasis Maqashid Syariah terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. *Iqtishoduna*, 16(1), 39–58. [Google Scholar](#)
- Sukirno, S. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. [Google Scholar](#)
- Suyono, B. (2018). Pengaruh Upah Minimum Regional , Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Kabupaten Magetan. *Jurnal Ekonomaks*, 7(1). [Google Scholar](#)
- Tambunan, T. (2001). *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta:Ghalia Indonesia. [Google Scholar](#)

- Tisniwati, B. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 33–46. [Google Scholar](#)
- Todaro, M. p. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ketujuh diterjemahkan oleh Haris Munandar*. Jakarta:Erlangga.
- Todaro, M. p. (2003). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga jilid 2*. Jakarta:Erlangga [Google Scholar](#).
- Wijayanti, D., & Wahono, H. (2005). Analisis Konsentrasi Kemiskinan di Indonesia Periode Tahun 1999-2003. *Economic Journal of Emerging Markets*, 10(3). [Google Scholar](#)
- Windra, Marwanto, P. B., & Rafani, Y. (2016). Analisis pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di indonesia. *Jurnal Ilmiah Progresif Manajemen Bisnis (Jipmb)*, 14(November), 19–27. [Google Scholar](#)
- Yacoub, Y. (2013). *Pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. [Google Scholar](#)
- Yusnedi, Apriansyah, R., Agustin, S., & Anggraini, M. F. (2019). Pengaruh Upah Minimum Kabupaten (Umk) Dan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Ilmiah Mahasiswa Manajemen Dan Bisnis (JIMB2B)*, 2(1), 52–60. [Google Scholar](#)
- Zamhari, J., Wisadirana, D., & Kanto, S. (2015). Analisis Determinan Kemiskinan di Jawa Timur. *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 18(01), 41–50. [Google Scholar](#)
- Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 27–31. [Google Scholar](#)

Copyright holder:

Deby Oktaviana, Wiwin Priana Primandhana dan Mohammad Wahed (2021)

First publication right:

Journal Syntax Idea

This article is licensed under:

